

## Mantan Kapolres Tapsel Akui Terlibat .....

**Dari Halaman 1**

saat menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, Eko Putra Prayitno.

Menurutnya, perkenalan itu terjadi karena Topan Ginting menanyakan siapa rekanan yang memiliki pabrik aspal atau Asphalt Mixing Plant (AMP) di wilayah Tapsel.

Yasir menjelaskan, dirinya pertama kali berkenalan dengan Topan pada Maret 2024, ketika terjadi bencana alam di Tapsel.

"Kami berkenalan saat kunjungan rombongan Pemprov Sumut meninjau banjir bandang di Tapsel. Waktu itu ada kegiatan pemberian bantuan sekaligus pemeriksaan alur sungai," kata Yasir.

Mantan kapolres itu juga mengaku beberapa kali bertemu dengan Akhirun. Bahkan, menurutnya, terdakwa yang kerap dipanggil Haji Kirun tersebut sempat meminta bantuan agar anaknya bisa masuk kuliah kedokteran di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Khamazaro Waruwu menegaskan bahwa Yasir seharusnya menjaga integritas jabatannya.

"Kalau saudara coba menjembatani atau menghubungkan mereka, ada apa? Saudara harusnya malu

dengan jabatan kapolres," ucap hakim.

Selain Yasir, sidang juga menghadirkan tiga saksi lain, termasuk Pj Sekda Pemprov Sumut Effendi Pohan. Sementara Topan Ginting dan Rasuli yang sedianya dipanggil, batal hadir dan dijadwalkan memberikan keterangan pada Kamis (2/10/2025).

JPU KPK Eko Wahyu menyatakan, pihaknya akan menghadirkan sekitar 30 hingga 40 saksi dalam perkara ini. Kasus tersebut menyeret Akhirun bersama anaknya, Muhammad Rayhan Julasmi Piliang alias Rayhan, terkait dugaan suap untuk mendapatkan dua proyek jalan di Sumut senilai Rp165 miliar.

**Layak Ditetapkan Tersangka**

Pengakuan mantan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi dalam sidang lanjutan perkara dugaan suap proyek peningkatan jalan provinsi ruas Hutaimbaru-Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (1/10/2025), cukup mengjutkan.

Ternyata, beliau adalah sosok yang memperkenalkan terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group (DNG), kepada mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Ginting.

Menanggapi hal itu, praktisi hukum Sumatera Utara Eka Putra Zakhran SH MH menyatakan kalau AKBP Yasir Ahmadi layak ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau dugaan keterlibatan saksi (AKBP Yasir Ahmadi) itu sah-sah saja. Sama halnya ketika dengan pemeriksaan dari pihak terkait, dalam hal ini aparat penegak hukum (KPK). Kalau enggak, mana mungkin mereka menyeret-nyeret dan menyebut-nyebut namanya sebagai saksi. Karena kapasitas dia dari awal itu sebagai telangai yang mempertemukan kedua terdakwa. Sedikit banyaknya, ya yang namanya telangai itu rahasia umumlah," ungkap Eka Putra Zakhran, atau yang akrab disapa EPZA.

Ia juga menyebutkan, sebagai negara hukum, maka prinsip-prinsip rule of law itu memang harus tegak. Pertama, jaminan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, equality before the law (semua sama di mata hukum).

"Kalau memang dia, siapapun dia, apalagi aparat kepolisian atau aparat apa pun dia, aparat pemerintah, kalau memang terindikasi terlibat sebagai pelaku tindak pidana korupsi, ya harus diproses hukum," imbuhnya.

"Kalau memang pada akhirnya nanti dalam fakta-fakta persidangan memang mengalir dan dipastikan beliau terlibat, ya mau tidak mau, apa pun ceritanya, sebagai aparat kepolisian, ya tetap harus diproses hukum. Baru kita bicara tentang Indonesia adil makmur, Indonesia bersih, Indonesia menegakkan supremasi hukum," EPZA, mengakhiri. (A-08/A-10)

## Topan Ginting Dipastikan Hadir Hari Ini .....

**Dari Halaman 1**

di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (1/10/2025).

Ia menjelaskan, Topan seharusnya dijadwalkan hadir pada persidangan hari ini, namun batal karena masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

"Hari ini yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan, jadi dijadwalkan besok bersama para saksi lainnya,"

ujar Eko.

Eko menambahkan, pihaknya akan menghadirkan sekitar 30 hingga 40 saksi dalam kasus yang menyeret terdakwa Akhirun Piliang alias Kirun bersama anaknya, Muhammad Rayhan Julasmi Piliang alias Rayhan, terkait dugaan suap untuk mendapatkan dua proyek jalan di Sumut.

Dalam persidangan hari ini, lanjut JPU Eko, pihaknya menghadirkan lima saksi, yakni mantan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi,

lalu mantan Pj Sekda Pemprov Sumut Muhammad Armand Effendy Pohan.

Kemudian, Bendahara UPTD Gunung Tua Irma Wardani, Kepala Bappellitbang Sumut Dicky Anugerah Panjaitan, serta Abdul Aziz Nasution merupakan ASN UPTD Gunung Tua.

"Sementara Topan dan Rasuli Efendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua, dipastikan akan memberikan keterangan pada persidangan besok," tegas JPU Eko. (A-08)

## Hakim Minta KPK Buka Sprindik Baru .....

**Dari Halaman 1**

Menurut Hakim Khamazaro, sprindik baru penting untuk mengusut tuntas, siapa saja yang harus bertanggung jawab dalam kasus korupsi proyek jalan tersebut.

Pemintaan itu disampaikan hakim ke jaksa KPK saat mantan Pj Sekda Pemprov Sumut, Effendy Pohan dihadirkan sebagai saksi, dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Ruang sidang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (1/10/2025).

Awalnya, hakim Khamazaro dan Effendy Pohan terlihat saling berseteru dalam persidangan perihal pengeseran anggaran untuk proyek Jalan Hutaimbaru-Sipiongot yang dinilai janggal.

Menurut Effendy Pohan selaku Ketua Tim Percepatan Anggaran Daerah (TPAD), pembahasan pengeseran anggaran tidak sepenuhnya dihadiri oleh anggota TPAD yang berjumlah sekitar 50 orang.

"Izin yang mulia, secara de facto, dalam rapat TPAD tidak pernah hadir semuanya ini," kata Effendy menjawab Khamazaro.

"Lalu kalau tidak hadir, kenapa dipaksakan," tanya Khamazaro kembali.

Khamazaro heran, kenapa anggota TPAD tidak kuorum tetapi dipaksakan untuk pengeseran anggaran.

"Tidak ada yang mengharuskan kuorum yang

mulia," jawab Effendy

"Kalau tidak ada kuorum, berarti bisa suka-suka," timpal Khamazaro.

Namun, Effendy tetap berkilah bahwa semua bisa menandatangani walaupun tidak semua anggota hadir. Pernyataan Effendy itu, membuat Khamazaro semakin bingung.

"Tetapi, tadi saudara mengatakan tidak semua hadir," kata Khamazaro.

Lantas, Hakim Khamazaro meminta jaksa KPK agar menyita semua dokumen yang berkaitan dengan pengeseran anggaran.

"Akar permasalahannya itu, di situ penganggaran yang mungkin tidak normal, lalu tiba-tiba muncul, itu yang mau kita lihat," kata Khamazaro.

Menurut Khamazaro, berdasarkan keterangan saksi dari PUPR pada sidang sebelumnya, yang namanya proyek fisik maka wajib ada dokumen-dokumen pendukung.

"Maka ketika itu tidak ada. Bagaimana tim TPAD bisa memunculkan Rp 200 miliar lebih tanpa dokumen lengkap," tanya Khamazaro.

Namun, menurut Effendy bahwa dokumen pendukung tidak pernah sampai ke tim TPAD.

"Lalu bagaimana saudara bisa menentukan nominal anggaran," tanya Khamazaro kembali.

Menurut hakim, Effendy selaku ketua Tim

## Plat Kendaraan Bermotor Bukan Tugas Gubernur .....

**Dari Halaman 1**

f. Pajak Rokok; dan, g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pendapatan asli daerah provinsi yang utama adalah pajak daerah yang mayoritas diperoleh dari kendaraan bermotor. Sehingga sangat wajar setiap gubernur, terutama yang tidak memiliki kreativitas dalam meningkatkan PAD, fokus mengejar pajak yang berhubungan dengan kendaraan bermotor. Meski demikian, akrobat mempersoalkan sejumlah plat nomor kendaraan yang melintas atau beraktivitas di sejumlah provinsi oleh gubernur adalah upaya cari muka, demi meraih simpati rakyat yang sudah lama muak.

Istilah bad news is a good news belakangan ini gemar dipakai para kepala daerah, gubernur, bupati/walikota. Meski tak lagi pakai kemeja putih, sepatu sneakers atau kets, dan masuk gorong-gorong, para kepala daerah masih gemar beraksi demi viral. Para kepala daerah kini berkompetisi mengejar clickbait, bukan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) atau indeks pencegahan korupsi daerah (IPKD).

Akhirnya para kepala daerah memilih menjadi tontolan, bukan tuntunan, seperti joget-joget pakai singlet dengan supporter. Touring meninjau jalan rusak dengan kontraktor yang berujung OTT dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, meski mengaku baru saling kenal di lokasi. Terburu, aksi menyotek truk di jalan raya, dengan lensa kamera yang banyak. Narasi memperjuangkan rakyat meningkatkan PAD pun ditabur. Atraksi di depan kamera lebih penting daripada

kesungguhan meningkatkan PAD.

Agar publik tidak terlena dengan akrobat para kepala daerah yang sedang cari muka, perlu diberi catatan sebagai berikut:

Pertama, bahwa provinsi sebagai daerah otonom tidak sama dengan negara bagian pada sistem pemerintahan federal. Maka tidak ada hukum yang berlaku secara khusus pada daerah terkait kendaraan bermotor. Semua kendaraan dengan plat kendaraan yang legal berhak menggunakan seluruh jalan di seluruh wilayah NKRI.

Kedua, jika PAD ingin diperoleh secara optimal dari kendaraan bermotor, maka yang harus dikejar adalah pendataan secara valid jumlah kendaraan bermotor dalam satu provinsi. Sebab patut diduga jumlah kendaraan bermotor riil dalam satu provinsi berkisar dua kali lipat dari jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan membayar pajak. Diduga ada kebocoran data kendaraan bermotor dan yang tidak membayar pajak.

Ketiga, bahwa potensi peningkatan PAD dari kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak dan kendaraan bermotor yang diduga memiliki identitas rangkap atau tanpa identitas jauh lebih potensial untuk digarap daripada memaksa pemilik kendaraan luar provinsi pindah plat nomor kendaraan bermotor.

Keempat, bahwa pengalaman penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor menjadi bahan bakar untuk kebutuhan industri mengurangi PBBKB. Maka Pemda dengan Polri harus serius mengejar para mafia BBM yang mengalihkan BBM bersubsidi menjadi BBM non subsidi untuk kebutuhan industri.

Kelima, bahwa Pemda harus memasang alat

(meteran) bagi pelaku usaha yang menggunakan air permukaan sebagai salah satu sektor pajak daerah provinsi. Pembayaran pajak dengan cara ditaksir berpotensi melahirkan kebocoran atau main mata antara wajib pajak dengan oknum pegawai di badan pendapatan daerah (Bapenda).

Keenam, bahwa pajak rokok juga masuk PAD provinsi, maka peredaran rokok ilegal tanpa cukai akan menghilangkan potensi pajak rokok. Maka Pemda dan Polri harus membasmi peredaran rokok ilegal dengan menagok para oknum aparat yang terlibat.

Ketujuh, bahwa Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak provinsi yang dapat meningkatkan PAD. Aktivitas penambahan betonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa. Dengan besaran maksimal 20% untuk provinsi.

Kedelapan, bahwa persoalan utama pemerintahan dan pemerintah daerah bukan penerimaan pajak, tetapi pengeluaran. Tingkat kebocoran anggaran dan pemborosan anggaran telah menjadi bagian dari keserbian kita. Maka yang mendesak dilakukan adalah menghentikan pemborosan dan menutup keran kebocoran.

Maka para kepala daerah tidak perlu melakukan akrobat politik, memoles citra di depan lensa kamera. Patriotisme saat ini adalah ketika kepala daerah dan keluarganya tidak melakukan praktik korupsi, melukai hati rakyat dengan kegiatan seremonial, naik jet pribadi, pamer kekayaan, gaya hidup mewah (flexing). Tidak mengangkat kerabat dan kolega sebagai pejabat pemerintah dan BUMD. Memberi akses kepada kerabat dan kolega menjadi pengatur jabatan dan proyek, serta memperdagangkan pengaruh. (\*)

termasuk peningkatan kapasitas legislatif di bidang penganggaran.

4. Reformasi Sistem Pengadaan Barang dan Jasa: Pengadaan harus berbasis kompetensi dan diawasi independen.

5. Penerapan Sistem Merit & Integritas ASN, terutama bagi pejabat yang terlibat langsung dalam proses anggaran.

Kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengeseran APBD dan korupsi pembangunan jalan di Sumut adalah tamparan keras bagi sistem administrasi publik kita. Ia menunjukkan betapa rentannya sistem birokrasi ketika prinsip good governance diabaikan.

Reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan digitalisasi atau slogan anti-korupsi. Ia membutuhkan komitmen politik, sistem pengawasan yang kuat, dan partisipasi masyarakat secara aktif.

Administrasi publik seharusnya menjadi alat perubahan dan pelayanan. Bukan alat kekuasaan dan penyalahgunaan. (\*)

kerusakan. Gedung boleh megah, jalan boleh mulus, tapi wibawa pemerintah runtuh. Rakyat kehilangan hormat, hukum kehilangan makna, kota kehilangan arah.

Maka pertanyaan itu layak kita ulang. Medan ini kota atau pasar? Kota yang dibangun di atas aturan, atau pasar yang dibangun di atas tawar-menawar? Kalau jawabannya yang kedua, maka jangan kaget bila rakyat kehilangan kepercayaan. Sebab kota tanpa aturan hanyalah panggung besar untuk dagang kuasa. (\*)

## Gubernur Beri .....

**Dari Halaman 1**

Upacara berlangsung penuh hikmah, dihadiri para unsur Forkopimda seperti Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Febuanto, Pangdam I/BB Mayjen TNI Rio Firdianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut Harli Siregar, Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti, dan pimpinan lainnya. Hadir juga Sekdaprov Sumut Tugos Simangunsong, beserta kepala OPD, Kepala Daerah serta pejabat lainnya.

Dalam upacara tersebut, Gubernur membacakan teks Pancasila sebagai wujud ikrar kesetiaan kepada Dasar Negara yang hingga kini bangsa Indonesia tetap berpegang teguh pada lima sila sebagai landasan ideologis. Para peserta upacara dan seribu warga yang hadir di lokasi juga ikut mengucapkan kalimat tersebut.

"Agar perigatan ini dimaknai masyarakat, bahwa Dasar Negara kita adalah Pancasila. Itulah yang dipertahankan oleh para pendahulu, sekarang kita dan akan diteruskan, dari generasi ke generasi," ujar Gubernur, Rabu (1/10/2025).

Usai bertindak sebagai Inspektur Upacara, Gubernur bersama unsur Forkopimda kemudian meletakkan karangan bunga di Monumen Sujono, Bandar Betsy. Selanjutnya kepada keluarga Letda Sujono, Bobby juga menyerahkan tali asih sebagai wujud penghargaan kepada sosok Pahlawan Revolusi tersebut, dimana namanya banyak ditandai sebagai nama jalan di berbagai daerah.

Selanjutnya, Gubernur juga menyaksikan pertunjukan teatrikal peristiwa Bandar Betsy, dimana Letda Sujono gugur saat berupaya mempertahankan tanah perkebunan milik negara yang hendak diambil paksa oleh para penggarap saat itu. Ribuan orang yang berada di tepi lapangan ikut menyaksikan aksi kolosal tersebut.

Sebelum meninggalkan lokasi, Gubernur Bobby Nasution juga menyempatkan berfoto bersama para siswa SMA serta para pemain teatrikal. Bahkan warga yang hadir, juga memintanya untuk bisa mengabdikan kehadiran orang nomor satu di Sumut itu pada peringat momentum bersejarah bagi Indonesia. \*\* (A-05)

## Kasus Penggelapan .....

**Dari Halaman 1**

Kekecewaan pun dirasakan Maruli U Tobing. Ia merasa kesulitan mencari keadilan, khususnya di Polres Samsir.

"Ini benar-benar tidak adil. Hukum pilih bulu. Pengadilan saya sudah lebih 2,5 tahun, tapi tak seorang pun ditetapkan tersangka," sesal mantan wartawan Harian Kompas.

Dikatakannya, kasus penggelapan di Hotel Toledo adalah bagian kecil dari milyaran rupiah uang yang diduga digelapkan oleh pengelola.

Selama 8 tahun hotel warisan dr. Luhut Lumbantobing itu dikuasai Tio Dohar dan Cyccu Lumbantobing. Dan selama itu pula tak pernah dilakukan audit keuangan maupun RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), sebagaimana diwajibkan UU Perseroan.

Ia juga menyalahkan sikap Kapolres Samsir yang seolah membangkang atensi Kapolda Sumut.

Sebab, dua bulan lalu Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisnu Hermawan Febuanto S.I.K.,M.H, meminta Kapolres Samsir agar secepatnya menyelesaikan pengadilan tersebut demi menjaga citra dan profesi Polri. Namun hingga sekarang hal tersebut diabaikan. (A-10)

## Berkas 9 Terdakwa

**Dari Halaman 1**

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode 2023; Sani Dinar Saifudin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional periode 2022-2025; Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping periode 2022-2025.

Kemudian, Agus Purwono selaku VP feedstock PT Kilang Pertamina Internasional periode 2023-2024; Maya Kusuma selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga periode 2023; Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Niaga periode 2023-2025. (r/A-10)



**Dari Halaman 1**

jumlah pertanyaan mendasar yang perlu dikritisi. Apakah kebijakan ini benar-benar mampu menjamin akses kesehatan universal? Bagaimana mekanisme pembiayaan, ketersediaan fasilitas, dan kualitas layanan medis di lapangan?

Salah satu keluhan utama masyarakat selama ini adalah ribetnya prosedur ketika ingin berobat. Pasien harus memastikan iuran BPJS aktif, membawa kartu fisik, atau menunggu lama di ruang administrasi. Dengan kebijakan baru ini, hanya bermodalkan KTP, masyarakat sudah bisa mendapatkan layanan.

Ini jelas sebuah langkah besar dalam mewujudkan prinsip "universal health coverage" yang menjadi cita-cita sistem kesehatan nasional. Setiap warga negara berhak atas layanan kesehatan yang adil dan merata. Dengan penyederhanaan administrasi, beban psikologis warga yang sedang sakit pun berkurang.

Meski menjanjikan, pertanyaan besar muncul pada aspek teknis. Pertama, bagaimana sistem ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan? Jika semua pasien bisa berobat hanya dengan KTP, apakah klaim biaya akan ditanggung pemerintah daerah, BPJS, atau ada skema subsidi khusus? Transparansi mekanisme pembiayaan sangat penting agar kebijakan ini tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.

Kedua, kesiapan infrastruktur kesehatan di Sumut. Rumah sakit dan puskesmas di Medan mungkin relatif siap, tetapi bagaimana dengan daerah terpencil seperti Nias, Mandailing Natal, atau Tapanuli? Tanpa pemerataan tenaga medis, peralatan, dan fasilitas, kebijakan ini bisa timpang: mudah di kota, sulit di desa.

Ketiga, kualitas pelayanan. Ada kekhawatiran antrean pasien justru semakin panjang. Jika beban pasien meningkat tanpa diimbangi peningkatan kapasitas layanan, maka keluhan soal lama menunggu dan kurangnya obat bisa semakin sering terdengar.

Tak bisa dihindari, kebijakan ini juga memiliki nuansa politik. Dengan momentum menjelang tahun politik lokal, janji layanan gratis atau sederhana sering dijadikan jualan elektoral. Meski demikian, kita harus menilai kebijakan ini secara rasional: apakah ia benar-benar berbasis data kebutuhan masyarakat dan perhitungan keuangan yang matang, atau sekadar gimmick jangka pendek?

Agar kebijakan ini tidak hanya menjadi jargon, ada beberapa langkah yang sebaiknya ditempuh. Pertama, integrasi data antara KTP elektronik, BPJS, dan sistem rumah sakit harus dipercepat. Dengan begitu, klaim biaya lebih transparan dan akurat.

Kedua, pemerintah daerah perlu menambah anggaran kesehatan bukan hanya untuk membayar klaim, tetapi juga memperkuat infrastruktur dasar: puskesmas rawat inap, distribusi obat, hingga insentif tenaga kesehatan di daerah.

Ketiga, pengawasan publik harus diperkuat. DPRD, media, dan masyarakat sipil punya peran untuk memastikan kebijakan ini tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat.

Berobat hanya dengan KTP adalah sebuah terobosan yang memberi harapan bagi masyarakat Sumatera Utara. Ia sejalan dengan prinsip bahwa negara hadir dalam melindungi warganya. Namun, tanpa persiapan matang, kebijakan ini bisa berbalik menjadi bumerang: antrean panjang, layanan menurun, bahkan krisis keuangan daerah.

Harapan kita, pemerintah tidak berhenti pada gagasan besar, tetapi juga mengeksekusi detail teknis dengan cermat. Karena pada akhirnya, yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar janji kesehatan universal, melainkan pelayanan yang benar-benar mudah, cepat, dan bermutu.

## Medan, Kota Tanpa Aturan? .....

**Dari Halaman 1**

nilainya, atau sudah jadi dagangan murah?

Yang paling ironis, ketidakadilan telanjang di depan mata. Orang kecil bikin pagar rumah, langsung ditindak. Orang kampung bangun dapur, segera dipaksa roboh. Tapi gedung tinggi bisa tenang berdiri meski izinnya cacat. Di sini kita melihat jelas, hukum memang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Islam sudah jauh-jauh hari memperingatkan. "Sesungguhnya orang-orang yang suka memakan harta dengan cara batil, mereka itu sesungguhnya menelan api ke dalam perutnya." (QS. An-Nisa: 10). Apa yang dilakukan pejabat dengan PAD yang bocor, dengan izin yang diperdagangkan, tak lain adalah memakan api. Api itu mungkin tak terasa sekarang, tapi kelak ia akan membakar, bukan hanya dirinya, melainkan juga kota ini.

Kalau aturan hanya jadi komoditas, maka yang lahir bukanlah pembangunan, melainkan